

REVITALISASI LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

Oleh: Harum Natasha

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Abstract

Education in Indonesia is having a great challenging. It cannot be denied that nation moral degradation today is related to our education system and institution. Start from corruption happened in almost all government institution, nepotism in recruitment as well as collusion in every policy and development program arrangement has been unconsciously the root grown and developed forming nation character.

In addition, within the global problems which have positive and negative impact toward Indonesian life. It needs intellectual ability and emotional maturity to maximize the positive impact from the globalization itself such as the opening of working opportunity based on society and nation needs. To minimize the negative impact such as the changing of norm and the value of life which oftenly be contradictive with the norm and the value of life in society, including indicator and nation character changing.

The success of education with character is really defined by the institution with character. It should be reflected from the teacher/lecturer character, education leader and education institution environment. The empowerment of education institution apparatus especially the education leader as well as teacher and lecturer by giving opportunity to function and dinamize the implementation of nation philosophy into integrated and sustainable education institution. Revitalisation at this point related to the selection of education institution on teachers employment so that the quality standard used on this would not be low. Therefore, in the future could share the success to build education with character which is able to touch all way, level, and types of education in this nation.

Kata Kunci: Revitalisasi, Pendidikan, Karakter

Pendahuluan

Dunia pendidikan Indonesia mengalami tantangan yang sangat berat. Tidak bisa dipungkiri permasalahan degradasi moral bangsa yang dihadapi sekarang ini memiliki benang merah dengan sistem dan lembaga pendidikan kita. Dari permasalahan korupsi yang terjadi hampir di sebagian besar instansi pemerintah, nepotisme dalam perekrutan anak bangsa serta kolusi dalam setiap penyusunan kebijakan dan program pembangunan telah secara tidak disadari menjadi akar yang tumbuh dan berkembang membentuk karakter bangsa.

Bahkan kemunduran moralitas bangsa sudah menyebar ke dalam sendi-sendi kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Perilaku sebagian elit pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) benar-benar tervisualisasikan di dalam setiap gerak-gerik elemen masyarakat. Diantaranya perilaku menghalalkan segala cara untuk menang, kekerasan, menyogok pejabat untuk menjadi PNS/Karyawan, budaya *materialistik, konsumerisme, hedonisme, sekulerisme dan individualistic, plagiarisme*, penentuan sekolah/ perguruan tinggi berdasarkan besaran uang yang dimiliki, budaya kebersihan semakin menurun, budaya antre dan sopan-santun semakin pudar, dan lain sebagainya.

Ditambah lagi dengan permasalahan globalisasi yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Dibutuhkan kepekaan intelektual (*intellectual ability*) dan emosional (*emotional maturity*) untuk memaksimalkan dampak positif dari globalisasi tersebut seperti terbukanya peluang pasar kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negara. Meminimalkan dampak negatifnya seperti terjadinya perubahan nilai dan norma kehidupan yang seringkali kontradiksi dengan norma dan nilai kehidupan yang telah ada di masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan indikator dan perilaku karakter bangsa.

A. Malik Fadjar menjelaskan bahwa pendidikan harus bisa memberikan solusi yang nyata terhadap persoalan globalisasi yang mendera bangsa Indonesia antara lain: (1) Stigma keterpurukan bangsa, (2) Eskalasi politik yang masih tidak stabil, (3) Krisis moral dan etika dan (4) Pudarnya identitas bangsa. Begitu beratnya tanggung jawab dunia pendidikan Indonesia di dalam menyelesaikan persoalan bangsa yang diiringi dengan kisah pendidikan di

Indonesia yang penuh keprihatinan. Mulai dari sakralisasi guru, degradasi mutu, sampai pada eksperimen kurikulum yang tak jelas arahnya maupun implementasinya hingga masalah yang sedang hangat saat ini yaitu kesulitan yang dialami siswa untuk mencapai area sekolahnya dikarenakan oleh jembatan yang putus.

Prof. Dr. Yahya Muhaimin dalam *Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*, mengatakan: “Indonesia dikenal memiliki karakter kuat sebelum zaman kemerdekaan, tatkala mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, karakter masyarakat Indonesia tidak sekuat pada masa lalu, sangat rapuh. Pemimpin saat ini juga tidak menjaga pembangunan karakter dan budaya bangsa.” (Kompas.com, 15/01/2010).

Jelas sekali salah satu penyebab kerapuhan kerakter bangsa identik dengan ketidakmampuan elit pemerintah dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai norma bangsa (pancasila). Mari dirunut kebelakang bagaimana sistem pemilihan elit pemerintah diusulkan oleh partai politik yang memiliki idiom “tidak ada kawan abadi dan tidak ada musuh abadi yang ada adalah kepentingan abadi”. Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua tentang keberhasilan dunia pendidikan di dalam membentuk karakter bangsa jika elit politiknya tidak mengkedepankan nilai-nilai moral bangsa.

Kegagalan pembentukan karakter elit pemerintah dan elit politik inilah yang menjadi tantangan besar dunia pendidikan. Setiap individu yang berada di dalam strata elit pemerintah dan elit politik merupakan orang-orang yang dihasilkan oleh sistem pendidikan nasional. Sudah pasti didalam mencapai jabatan ini mereka harus memiliki ijazah. Ini merupakan syarat administrasi yang harus didapatkan melalui jenjang pendidikan formal (SD, SMP, SMU dan Perguruan Tinggi).

Pendidikan formal merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang di dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab².

Namun, Muhammad Yaumi, dalam makalahnya yang berjudul “Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Melalui Transdisiplinartitas”, menguraikan tentang perlunya upaya revitalisasi pelaksanaan pendidikan nasional dikaji melalui pendekatan sisi pengembangan dan pembentukan karakter. Ia menuliskan bahwa tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertera pada undang-undang, secara jelas telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam menopang karakter dan jati diri bangsa. Tetapi dalam penyelenggaraannya telah mengalami degradasi, yaitu terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal oleh kuatnya arus pendidikan global, kecerdasan kognitif menjadi ukuran yang lebih dominan untuk menentukan keberhasilan dalam menempuh pendidikan. Akibatnya, tata krama, etika dan moral generasi bangsa tereduksi dalam sebuah nilai-nilai sempit *cognitive oriented*.

Jika hal ini dibiarkan maka selamanya output dari lembaga pendidikan kita adalah manusia-manusia yang miskin karakter, beragama, namun tidak tahu agama (moralitas dan spiritual hancur, intelektual nol, kreatifitas mati atau dengan kata lain tidak adanya keseimbangan antara afektif (iman), kognitif (ilmu) dan psikomotorik (amal), maka bukan suatu yang mustahil jika dalam beberapa tahun ke depan mentalitas bangsa ini adalah “*selvis mentality*”³.

Kegagalan Lembaga Pendidikan Dalam Membentuk Karakter Bangsa

Pendidikan memang hanyalah salah satu dari sekian banyak aspek pembentukan kehidupan manusia (peradaban). Namun, menurut Malik Fadjar (2005:103) pendidikan merupakan wahana ampuh untuk membawa bangsa dan negara menjadi maju dan terpadang dalam pergaulan bangsa-bangsa dan dunia internasional⁴. Ini jelas memberikan pemahaman yang sangat luas akan pentingnya pendidikan.

John Naisbitt dan Patricia Aburdence mengatakan, “Tepi Asia Pasifik telah memperlihatkan, negara miskin pun bangkit, tanpa sumber daya alam melimpah asalkan negara melakukan investasinya yang cukup dalam hal sumber daya manusia”. *Freire* dalam konsep pendidikan yang diperjuangkannya adalah pendidikan mampu memberikan warna dan arah baru perubahan struktur berpikir masyarakat dari masyarakat yang berpikiran magis dan naif menuju masyarakat yang berpikiran kritis.

Sementara, Ki Hajar Dewantara berpendapat pendidikan merupakan tonggak berdirinya sebuah bangsa yang besar, berdaulat, berharkat, dan bermartabat. Pendidikan bertujuan menanamkan nilai-nilai hidup rukun dan

damai di antara semua elemen bangsa, tanpa memandang kelas apapun. Yang jelas, pendidikan merupakan bagian dari sebuah alat perdamaian menuju bangsa yang sehat lahir dan batin.

Begitu besarnya tanggung jawab dunia pendidikan dalam membentuk identitas dan karakter bangsa sehingga menuntut kesiapan kelembagaan pendidikan. Namun, ini masih “jauh panggang dari api”. Dr Avip Saefullah drg M.Pd menyatakan lembaga pendidikan di Indonesia ternyata gagal berperan sebagai pranata sosial yang mampu membangun karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai normatif kebangsaan yang dicita-citakan. Yang terbangun saat ini justru perilaku elite negeri yang bertolak belakang dengan nilai sosial dan kehendak masyarakat. Celakanya, model perilaku paradoksal inilah yang berkembang menjadi spirit nasional dan terkesan menjadi karakter bangsa. Lembaga pendidikan di Indonesia belum mampu menegakkan nilai-nilai demokratis dan menyiapkan masyarakat yang kritis dengan basis pengetahuan dan kompetensi. Penerimaan tenaga pengajar yang masih KKN dan penyeleksian siswa/mahasiswa yang masuk ke sekolah/Perguruan Tinggi yang belum maksimal. Akumulasi dari perilaku itu kemudian juga membuat kemunduran bangsa, baik dari segi pembangunan ekonomi maupun pengembangan kualitas sumber daya manusianya (Diskusi FORMOPI 17/3/2000).⁶

Bila dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa, pendidikan bisa diartikan secara lebih sempit sebagai suatu cara membangun dalam berkehidupan bersama. Dalam skala tataran antar komunitas, tanpa melihat etnis, suku, agama, ras dan sebagainya, berkehidupan bersama berarti telah sepakat secara sadar untuk melakukan ikatan bagi anggotanya menjadi suatu komunitas yang dilakukan dalam wilayah yang pasti dan sah, serta diakui komunitas masyarakat lainnya.

Kegagalan pendidikan dalam membangun karakter bangsa disebabkan banyak faktor. Pertama, karena ada banyak komponen dalam pendidikan seperti pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana maupun komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan nasional. Kedua, keseriusan pemerintah harus dibuktikan dengan aksi nyata yaitu dengan memberikan anggaran pendidikan yang memadai, meningkatkan kesejateraan pendidik serta memberikan pengelolaan pendidikan kepada yang ahli di bidangnya dalam artian pendidikan jangan dijadikan sebagai komoditas kepentingan politik. Selain dari itu pendidik (guru) juga harus memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan amanat dan tanggung jawab sebagai agen pembentukan karakter bangsa.

Dalam konteks memahami fenomena itu, menarik apa yang disarankan Unesco bahwa pendidikan harus mengandung tiga unsur: (a) belajar untuk tahu (*learn to know*), (b) belajar untuk berbuat (*learn to do*) dan (c) belajar untuk hidup bersama (*learn to live together*). Unsur pertama dan kedua lebih terarah membentuk *having*, agar sumberdaya manusia mempunyai kualitas dalam pengetahuan dan keterampilan atau *skill*. Unsur ketiga lebih terarah *being* menuju pembentukan karakter bangsa. Kini, unsur itu menjadi amat penting. Pembangkitan rasa nasionalisme, yang bukan ke arah nasionalisme sempit; penanaman etika berkehidupan bersama, termasuk berbangsa dan bernegara; pemahaman hak asasi manusia secara benar, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, pengembangan sensitivitas sosial dan lingkungan dan sebagainya, merupakan beberapa hal dari unsur pendidikan melalui belajar untuk hidup bersama.⁷

Dengan kata lain, belajar di dalam dunia pendidikan yang ideal adalah adanya sinergi dari ketiga unsur tersebut. Mendapatkan pendidikan bukan hanya agar manusia menjadi tahu namun juga belajar bagaimana mengaplikasikan apa yang telah diketahui. Sedangkan unsur yang ketiga merupakan titik tolak dari pendidikan berkarater dimana siswa mampu mengembangkan diri dengan baik ditengah masyarakat ketika mengaplikasikan apa yang telah mereka dapatkan di dunia pendidikan.

Revitalisasi Lembaga Pendidikan menuju Pendidikan Berkarakter

Revitalisasi pendidikan adalah upaya untuk memberikan daya hidup, daya tumbuh dan daya kembang baru kepada dunia pendidikan yang sekarang mengalami kemunduran bahkan kegagalan dalam mempersiapkan generasi muda sebagai para calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas dan berakhalk mulia di masa yang akan datang.

Revitalisasi lembaga pendidikan yang memiliki karakter secara konseptual, dapat didefinisikan sebagai upaya-upaya penanaman falsafah bangsa yang dianut. Dalam konteks ini, revitalisasi karakter lembaga pendidikan diartikan sebagai upaya-upaya yang sistematis dan terstruktur didalam mewujudkan Esa, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terlihat dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Perwujudan karakter di dalam bentuk pola berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan yang sesuai dengan norma kehidupan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuatnya.

Sedangkan pendidikan karakter bangsa adalah suatu sistem pembentukan nilai-nilai karakter bangsa kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai *"the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development"*. Proses pendidikan karakter bangsa di sekolah harus melibatkan semua komponen pemangku kepentingan pendidikan, baik internal sekolah maupun pihak eksternal sekolah. Pendidikan karakter bangsa juga harus tergambar secara terpadu dalam semua komponen pendidikan itu sendiri, seperti: isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga sekolah. Selain itu, pendidikan karakter bangsa di sekolah harus dimaknai sebagai gambaran perilaku warga dan budaya sekolah dalam kesehariannya. Artinya seluruh lini dan komponen di lingkungan masyarakat sekolah hendaknya mencerminkan terwujudnya pendidikan karakter itu sendiri. Baik dalam bentuk materi maupun aplikasi di kehidupan mereka.

Tambahan lagi, pengembangan pendidikan karakter juga berhubungan dengan pengembangan akhlak, moral dan pengembangan agama serta nilai spiritualitas seseorang. Di dalam ajaran Agama Islam, kebaikan atau akhlak berasal dari bahasa Arab *"khuluk"* yang artinya tabiat atau kebiasaan melakukan kebaikan, atau tata cara berperilaku dan berhubungan dengan orang. Ada beberapa akhlak mulia yang seringkali diungkapkan dalam ajaran agama Islam, yaitu perkataan baik (*al-kalam al-hasan*), mendahulukan kepentingan orang lain (*al-itsaar*) tolong menolong (*at-taawun*), dan hormat, izin serta penghormatan (*al-isti'dzan dan at-tahiyah*)⁹. *Setiap manusia yang melakukan pencapaian dalam aplikasi pendidikan berkarakter idealnya tentu memiliki sifat-sifat dan akhlak mulia sebagaimana terkandung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.*

Lickona, Schaps, dan Lewis (dalam Megawangi, 2004:149) menjelaskan 11 prinsip pendidikan karakter yang harus dilaksanakan oleh pendidik di sekolah yaitu: (1) Mensosialisasikan dan mengembangkan nilai-nilai etik yang dapat membentuk karakter; (2) Menjabarkan karakter secara komprehensif atau menyeluruh (mencakup pengetahuan, perasaan, dan perilaku kebaikan); (3) Menggunakan pendekatan utuh, proaktif, efektif bagi perkembangan karakter dengan cara menjadikan guru sebagai teladan, disiplin sekolah, kurikulum proses pembelajaran, manajemen kelas dan sekolah, integrasi materi karakter dan seluruh aspek kehidupan kelas, dan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat; (4) Menciptakan suasana kasih sayang di sekolah dan menjadikan sekolah sebagai model yang damai dan harmonis; (5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjalankan perbuatan baik; (6) Menyediakan kurikulum akademis yang bermakna dalam mendukung pengembangan karakter siswa atau berbasis kompetensi; (7) Mendorong motivasi diri, kepemimpinan siswa serta keterlibatan seluruh pengajar; (8) Melibatkan seluruh staf sekolah, keluarga dan masyarakat sebagai mitra bestari; (9) Menjalankan kepemimpinan moral dari pimpinan sekolah, dan guru serta pegawai di sekolah; (10) Melakukan kerjasama dengan orangtua murid dan masyarakat sekitarnya; (11) Melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap keberhasilan pendidikan karakter termasuk para guru dan siswa di sekolah.

Lickona dan kawan-kawan telah memaparkan dengan sangat jelas betapa kompliknya aplikasi pengembangan sebuah pendidikan berkarakter. Dimulai dengan pengenalan pendidikan karakter itu sendiri melalui penyampaian wacana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, penjelasan terhadap nilai-nilai itu sendiri, pemberian kesempatan serta fasilitas bagi guru dan siswa untuk menciptakan dan mengembangkan karakter mereka yang mengandung nilai-nilai tadi. Bahkan tidak itu saja, aplikasi pendidikan karakter ini juga didukung oleh orang tua dan masyarakat serta adanya evaluasi yang kontinu untuk melihat pencapaian pendidikan karakter ini.

Keberhasilan pendidikan berkarakter sangat ditentukan oleh lembaga pendidikan yang berkarakter. Ini tercermin dari karakter yang ada pada guru/dosen, pemimpin pendidikan dan lingkungan lembaga pendidikan. Pemberdayaan perangkat lembaga pendidikan terutama pimpinan pendidikan dan guru/dosen dengan memberikan kesempatan memfungsikan dan mendinamisasikan penerapan falsafah bangsa kedalam pranata-pranata pendidikan secara terpadu dan berkelanjutan. Revitalisasi pada titik ini terkait dengan selektifitas lembaga pendidikan dalam penerimaan tenaga pengajar, dimaksudkan agar standar kualitas yang digunakan dalam penerimaan tenaga pengajar tidak rendah.

Louis V. Gestner Jr. menyebutkan bahwa sekolah abad masa depan memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Pimpinan pendidikan yang dinamis dan komunikatif dengan kemerdekaan memimpin menuju visi keunggulan pendidikan, 2. Memiliki visi, misi dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas, 3. Tenaga pengajar

yang kompeten dan berjiwa kader yang senantiasa bergairah dalam melaksanakan tugas profesionalnya secara inovatif, 4) siswa/mahasiswa yang sibuk, bergairah dan bekerja keras dalam mewujudkan perilaku pembelajaran/karakter, 5. Masyarakat dan orang tua yang berperan serta dalam menunjang pendidikan karakter¹⁰.

Sedangkan peranan lembaga pendidikan yang berkarakter menurut Malik Fadjar (2005) yaitu, 1). Menerjemahkan nilai-nilai, norma-norma dan muatan pendidikan yang dituntut oleh masyarakat, bangsa dan negara yang terus bergerak secara dinamis, 2). Mengekolaborasi makna dan isi pendidikan sebagai praksis pembangunan bangsa sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perkembangan dan perubahan yang tengah berlangsung, 3). Menggali dan mencari alternatif-alternatif model dan jenis pendidikan yang berwawasan lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya¹¹.

Dari penjelasan Malik Fadjar di atas jelaslah bahwa peran lembaga pendidikan merupakan sebuah peran inti yang diemban demi terlaksananya pendidikan berkarakter. Implementasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan hendaknya bukan merupakan sebuah tindakan yang kaku dan statis demi memenuhi tuntutan disekitarnya. Hal ini juga berkaitan dengan perkembangan yang terjadi disekitar lembaga itu sendiri. Dan tentu saja tidak hanya sebagai sebuah lembaga yang pasif namun senantiasa aktif untuk melakukan pembaharuan dalam menemukan pilihan-pilihan lain yang berpengaruh terhadap lingkungan daerah sekitarnya.

Kesimpulan

Revitalisasi lembaga pendidikan sudah menjadi keharusan untuk menjawab permasalahan dunia pendidikan di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri permasalahan degradasi moral bangsa yang dihadapi sekarang ini memiliki benang merah dengan sistem dan lembaga pendidikan. Revitalisasi pendidikan adalah upaya untuk memberikan daya hidup, daya tumbuh dan daya kembang baru kepada dunia pendidikan yang sekarang mengalami kemunduran bahkan kegagalan dalam mempersiapkan generasi muda sebagai para calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas dan berakhalk mulia di masa yang akan datang.

Perwujudkan karakter di dalam bentuk pola berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan yang sesuai dengan norma kehidupan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuatnya.

Keberhasilan pendidikan berkarakter sangat ditentukan oleh lembaga pendidikan yang berkarakter. Ini harus tercermin dari karakter guru/dosen, pemimpin pendidikan dan lingkungan lembaga pendidikan. Pemberdayaan perangkat lembaga pendidikan terutama pimpinan pendidikan dan guru/dosen dengan memberikan kesempatan memfungsikan dan mendinamisasikan penerapan falsafah bangsa kedalam pranata-pranata pendidikan secara terpadu dan berkelanjutan. Revitalisasi pada titik ini terkait dengan selektifitas lembaga pendidikan dalam penerimaan tenaga pengajar agar standar kualitas yang digunakan dalam penerimaan tenaga pengajar tidak rendah. Sehingga ke depan bisa berbagi kesuksesan untuk membangun pendidikan karakter yang mampu menyentuh semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan di tanah air Indonesia ini.

Endnote

¹ Malik fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2005, hal 68

² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta

³ John Naisbitt dan Patricia Aburdence hal 184 dalam M.Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia*; Ar-Ruzz Media 2009, Yogyakarta

⁴ Ibid hal 2.

⁵ M.Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia*; Ar-Ruzz Media 2009, Yogyakarta

⁶ Diskusi FORMOPI 17/3/2000 di dalam Deni Hardianto, *Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Terpadu*.

⁷ Ibid hal 5.

⁸ Udin Syaefudin Sa'ud, *Revitalisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar Untuk Fasilitasi Pendidikan Karakter Bangsa Yang Kokoh Bagi Generasi Masa Depan*, www.soulofcipta.blogspot.com

⁹ Ibid hal 8.

¹⁰ Louis V. Gestner Jr di dalam Qodri Azizy, *Membangun Intengritas Bangsa*, Renaisan 2008, hal 68.

¹¹ Ibid hal 2.

Harum Natasha: Revitalisasi Lembaga Pendidikan dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa

DAFTAR PUSTAKA

Diskusi FORMOPI 17/3/2000 di dalam Deni Hardianto, *Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Terpadu*.

M.Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia*; Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2009.

Kompas, *Membangun Karakter Bangsa Lewat Pendidikan*; Selasa 7 Maret 2000.

Azizy Qodri, *Membangun Integritas Bangsa*, Renaisan, Jakarta 2008.

Malik fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2005.

Udin Syaefudin Sa'ud, *Revitalisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar Untuk Fasilitasi Pendidikan Karakter Bangsa Yang Kokoh Bagi Generasi Masa Depan*,
www.soulofcipta.blogspot.com.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Jakarta